



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAERAH TAHUN
2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan percepatan pengembangan kewirausahaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, iklim usaha dan daya saing, serta memperluas kesempatan kerja di daerah;
- b. bahwa pengembangan kewirausahaan membutuhkan sinergi dan koordinasi program lintas sektor antar organisasi perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengembangan kewirausahaan melalui sinergi dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah perlu disusun suatu rencana aksi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah Tahun 2023 - 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAERAH TAHUN 2023-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan.
2. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan.
3. Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kewirausahaan daerah tahun 2023-2027.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam melakukan pengembangan Kewirausahaan Daerah yang ditetapkan untuk periode tahun 2023-2027.

Pasal 3

Pengembangan kewirausahaan daerah bertujuan:

- a. meningkatkan peran strategik usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi sebagai pilar penggerak perekonomian Daerah;
- b. memperkuat kapasitas inovasi dan Kewirausahaan Daerah sebagai penyokong pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan;
- c. meningkatkan keahlian dan kompetensi modal insani untuk kegiatan konstruktif dan bernilai-tambah;
- d. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan penuh keberadaban.

BAB II

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah digunakan sebagai:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pengembangan Kewirausahaan yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing Perangkat Daerah.
 - b. pedoman bagi Pemangku Kepentingan dalam ikut serta mendukung percepatan penumbuhan dan rasio Kewirausahaan melalui penumbuhkembangan Wirausaha yang inovatif dan berkelanjutan.

- (2) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kewirausahaan.

Pasal 5

Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah diselenggarakan secara bersinergi oleh Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Pasal 6

- (1) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. sasaran;
 - d. indikator;
 - e. target;
 - f. pemangku kepentingan; dan
 - g. pihak terlibat.
- (3) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penyesuaian kriteria kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan kelompok sasaran berdasarkan kriteria Wirausaha dan ekosistem Kewirausahaan untuk mencapai target Pengembangan Kewirausahaan Daerah.

- (4) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan pada Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kewirausahaan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pemantauan kepada Gubernur.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 95

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 95 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAERAH
 TAHUN 2023 - 2027

RENCANA AKSI

I. RENCANA AKSI EDUKASI DAN PENYADARAN PUBLIK TENTANG KEWIRAUSAHAAN

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
1	Edukasi publik tentang budaya inovasi dan kewirausahaan daerah	Sosialisasi publik tentang gerakan kewirausahaan daerah	Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlunya eksposur kreativitas dan budaya inovasi masuk ke dalam program dan kegiatan di kelembagaan pendidikan, sosial, dan ekonomi	Seluruh SMK DIY mengajukan proposal kewirausahaan	67 SMK yang mengajukan Proposal	110 SMK	150 SMK	180 SMK	200 SMK	217 SMK	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	- Dinas Koperasi dan UMKM - Dinas Tenaga Kerja
				Tersampainya informasi kepada masyarakat tentang adanya sentra kewirausahaan pemuda (sosialisasi dan pendampingan)	100 orang	100	100	100	100	BPO	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Koperasi dan UMKM - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) - Organisasi Kepemudaan	
				Penambahan Jumlah Petani milenial (orang)	3000	25	25	25	25	25	DPKP DIY	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Polbangtan
				Peserta Pelatihan Agribisnis Tanaman Pangan (orang)	30	30	30	30	30	30	DPKP DIY	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, pelaku usaha

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
				Peserta Pelatihan Agribisnis Hortikultura (orang)	30	30	30	30	30	30	DPKP DIY	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota , Perguruan Tinggi, pelaku usaha
				Peserta Pelatihan Agribisnis Perkebunan (orang)	30	30	30	30	30	30	DPKP DIY	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota , Perguruan Tinggi, pelaku usaha
				Peserta Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan (orang)	30	30	30	30	30	30	DPKP DIY	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota , Perguruan Tinggi, pelaku usaha
				Sosialisasi Penumbuhan Industri Pangan Lokal (angkatan)	1	1	1	1	1	1	DPKP DIY	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota , BRIN, Perguruan Tinggi, LSM, pelaku usaha
				Temu kemitraan pelaku usaha pangan lokal (angkatan)	1	1	1	1	1	1	DPKP DIY	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota , Perbankan, Retail Modern, pelaku usaha
				Bimtek <i>Good Handling Practices</i> (GHP) Hortikultura (kelompok)	3	3	3	3	3	3	DPKP DIY	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ” petani/kelompok tani hortikultura

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
				Temu kemitraan pelaku usaha hortikultura (angkatan)	2	1	1	1	1	1	DPKP DIY	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Perbankan, Retail Modern, pelaku usaha hortikultura
				Bimtek Pasca Panen/Pengolahan Perkebunan (angkatan)	16	16	16	16	16	16	DPKP DIY	Dinas Pertanian Kabupaten, pengusaha dan praktisi, pelaku usaha perkebunan
				Temu kemitraan pelaku usaha perkebunan (angkatan)	2	2	2	2	2	2	DPKP DIY	Dinas Pertanian Kabupaten, BUMD, Retail Modern, pelaku usaha perkebunan
				Bertambahnya kalurahan yang mendapat sosialisasi pembentukan kelompok Desa PRIMA	137 kalurahan	142 kalurahan	147 kalurahan	152 kalurahan	157 kalurahan	162 kalurahan	1. Pemerintah Kalurahan 2. DP3AP 2 DIY dan Kab/Kota	1. Pemerintah Kalurahan 2. DP3AP 2 DIY dan Kab/Kota
				Jumlah Peserta Sosialisasi Kewirausahaan	400	450	500	550	600	650	Diskop UKM DIY, Disdikpora DIY, Dispar DIY	UMKM, Asosiasi UMKM, Asosiasi Pembina UMKM, Akademisi, Meida

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
				Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	25 orang	-	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Dinkop UKM DIY/PLUT DIY • Dinas Kesehatan • Praktisi • Perusahaan/UM KM
				Angkatan kerja khusus (disabilitas + lansia) yang diberikan pembekalan kewirausahaan	20 orang	-	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Dinkop UKM DIY/PLUT DIY • Dinas Kesehatan • Praktisi • Perusahaan/UM KM
				Tenaga Kerja Mandiri yang diberikan pembekalan kewirausahaan	-	-	25 orang	50 orang	50 orang	50 orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Dinkop UKM DIY/PLUT DIY • Dinas Kesehatan • Praktisi • Perusahaan/UM KM
				Jumlah Angkatan Kerja baru yang dilatih kewirausahaan	200 orang	140 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY (BLKPP DIY)	<ul style="list-style-type: none"> • Dinkop UKM DIY • Dinsos DIY
				- Jumlah Peserta Pelatihan UKM Berbasis Digital	200 orang	220 orang	240 orang	260 orang	280 orang	300 orang	Dinas Kominfo DIY	Komunitas UKM

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
				Pelatihan Teknologi Informasi kepada generasi millennial	200 orang	220 orang	240 orang	260 orang	280 orang	300 orang	Dinas Kominfo DIY	Kelompok Pemuda, Karang Taruna, Praktisi
				Edukasi Kapasitas G2R (Global Gotong Royong) Tetrpreneur	26 kelurahan	28	31	34	37	40	Pemda, Pemkab, Pemkal, BUMDes, Akademik, Industri	Pemkal, PKK, Karang Taruna, Gapoktan, Pokdarwis, KWT, organisasi masyarakat lainnya, umkm, Tim Pakar (Univ/Industri)
				Peserta Bimbingan Teknis Online Single Submission (OSS)	50 orang	50	50	50	50	50	DPMPTSP DIY	OPD Teknis Pengampu Pelayanan Perizinan, Pelaku UMKM DIY
				Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	DISPERIND AG	DISPERINDAG, DPMPTSP, DISKOP UKM
2	Sinergi pusat-pusat inovasi dan kewirausahaan daerah	Sinergi kluster inovasi, inkubator, pusat	Pertumbuhan wirausaha baru yang terdaftar	Terbentuknya kelompok wirausaha SMK	77 Kelompok usaha wirausaha	97	127	157	187	217	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	- Dinas Koperasi dan UMKM - Dinas Tenaga Kerja

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
		desain, dan pengujian purwarupa	secara formal baik dalam bentuk kelembagaan ekonomi maupun kelembagaan sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Munculnya kelompok-kelompok usaha mikro kecil menengah yang baru - Bertambahnya wirausaha yang memiliki legalitas usaha 	126	229	251	277	304	335	BPO	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Koperasi dan UMKM - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) - Organisasi Kepemudaan
				Rintisan Wirausaha Baru Hortikultura (unit)	4	1	1	1	1	1	DPKP DIY	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota , Diskop UKM DIY, pelaku usaha hortikultura
				Kelembagaan Ekonomi Petani (unit)	5	5	5	5	5	5	DPKP DIY	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota , pelaku usaha
				Penerapan sistem pertanian organik komoditas tanaman pangan (kelompok)	1	1	1	1	1	1	DPKP DIY	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota , petani/kelompok tani tanaman pangan
				kelompok Desa PRIMA baru di	128 kelompok						1. Pemerintah Kalurahan	1. Pemerintah Kalurahan

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
				kalurahan yang mendapatkan SK Kepala Dinas P3AP2 DIY		137 kelompok	142 kelompok	147 kelompok	152 kelompok	157 kelompok	2. DP3AP2 DIY dan Kab/Kota	2. DP3AP2 DIY dan Kab/Kota
				anggota kelompok Desa PRIMA yang memiliki NIB	1120 orang	1145 orang	1170 orang	1195 orang	1220 orang	1245 orang	1. Pemerintah Kalurahan	1. Pemerintah Kalurahan
											2. DP3AP2 DIY dan Kab/Kota	2. DP3AP2 DIY dan Kab/Kota
												3. DPMPTSP DIY
				Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah Graduasi (sudah tidak menerima PKH/keluar dari PKH karena sudah tidak memenuhi komponen PKH namun masih perlu bantuan usaha dan punya embrio usaha	825	0	500	500	500	500	Dissos DIY	Dinas Sosial Kab/Kota

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
				Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah Graduasi Lanjutan (Penerima PKH Graduasi yang usahanya bisa terus berjalan/berkembang diberikan bantuan lagi)	540	0	300	300	300	300	Dissos DIY	Dinas Sosial Kab/Kota
				Bimbingan Pemantapan Penerima Manfaat/Bantuan UEP PKH Graduasi	825	0	500	500	500	500	Dissos DIY	Dinas Sosial Kab/Kota
				Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masing-masing kelompok 10 orang yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	0	23	23	23	23	23	Dissos DIY	Dinas Sosial Kab/Kota

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
				Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masing-masing kelompok 10 orang (Pemberian bantuan bagi KUBE penumbuhan yang bisa berkembang usahanya)	50 orang	0	0	50	50	50	Dissos DIY	Dinas Sosial Kab/Kota
				Penumbuhan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lestari Budaya, kelompok terdiri dari 10 anggota, harus sudah mempunyai usaha dan mendukung pelestarian nilai-nilai budaya	15	10	10	10	10	10	DInsos DIY	Dinas Sosial Kab/Kota

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
				Jumlah Kemitraan dalam rangka penumbuhan wirausaha baru	10	11	12	13	14	15	Diskop UKM DIY, Disdikpora DIY, Dispar DIY, Disperindag DIY	Lembaga Inkubator, PDIN, Balai TTG, BUMN, BUMD, Marketplace, Asosiasi Pengusaha, Perguruna Tinggi/Akademi si, Media
				Terselenggarakannya pelatihan pengolahan	2 angkatan	1	2	2	2	2	DKP DIY	Poklhasar. Akademisi, Kab/Kota
				Unit G2RT	23	28	31	34	37	40	Pemda, Pemkab, Pemkal, BUMDes, Biro Bermas, Diskop	Pemda, Pemkab, Pemkal, BUMDes, Biro Bermas, Diskop

II. RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAERAH

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
1	Akselerasi dan penguatan inovasi daerah	Penguatan kelembagaan inkubasi dan akselerasi produk inovasi	Pertumbuhan inkubator dan akselerator bisnis; jumlah kepesertaan (<i>tenant</i>); maupun serapan tenaga kerja	- Fasilitasi Inkubator	25	20	35	40	45	50	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	Diskop UKM, Disnakertrans, KADIN, Perguruan Tinggi, OJK, LJK
				- Jumlah kepesertaan kelompok wirausaha	125	185	155	235	325	425	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	Diskop UKM, Disnakertrans, KADIN, Perguruan Tinggi, OJK, LJK
				- Jumlah serapan tenaga kerja	175	225	225	315	415	525	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	Diskop UKM, Disnakertrans, KADIN, Perguruan Tinggi, OJK, LJK
				- Terjadinya peningkatan pertumbuhan dan hasil produksi sentra-sentra kewirausahaan	6 lembaga	6	6	6	6	6	BPO	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				- Terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja pada kelompok		6	6	6	6	6		- Dinas Koperasi dan UMKM

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseli ne	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
				usaha mikro kecil								- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Organisasi Kepemudaan
				Jumlah anggota kelompok Desa Prima	3425 orang	3550 orang	3675 orang	3800 orang	3925 orang	4050 orang	1. Pemerintah Kalurahan 2. DP3AP2 DIY dan Kab/Kota	1. Pemerintah Kalurahan 2. DP3AP2 DIY dan Kab/Kota
				Jumlah UMKM peserta inkubasi bisnis	100	150	200	250	275	300	Dikop UKM DIY	Lembaga Inkubator, Asosiasi Pengusaha dan Mentor Bisnis, Perguruan Tinggi, Tim Jogja Inkubator
				Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	1300 orang	1.380 orang	1.380 orang	1.400 orang	1.400 orang	1.420 orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY (BLKPP DIY)	• LSP BLK Surakarta • LSP Janabadra • TUK JPTM UNY
				Terselenggara kannya temu bisnis	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	DKP DIY	DKP DIY, Asosiasi Poklahsar, Kabupaten/Kota, Akademisi

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseli ne	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
				Terselenggara kannya Forum Pembinaan Perijinan SKP	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	DKP DIY, KKP	Unit Pengolahan Ikan (UPI), Dinas Kab/Kota
				Terselenggara kannya pembinaan mutu hasil perikanan	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	DKP DIY	Pelaku Usaha Perikanan, SKIPM, Akademisi, Kab/Kota, BPOM
				Pelatihan Pengolahan Tingkat Madya	0	0	1	1	1	1	DKP DIY	Poklhasar, Akademisi, Kab/Kota
				Tim G2RT (15-17 orang)	423	453	498	543	588	633	Pemkal, BUMDes, PKK, Karang Taruna, Gapoktan, Pokdarwis, KWT, organisasi masyarakat lainnya	BUMDes, PKK, Karang Taruna, Gapoktan, Pokdarwis, KWT, organisasi masyarakat lainnya, umkm
				UMKM G2RT	423	453	498	543	588	633	Unit G2R Tetrapreneur	Umkm, unit G2RT, BUMDes, Pemkal, organisasi masyarakat
				Mitra kompetisi	1	6	11	16	21	26	Unit G2R Tetrapreneur,	Industri, mitra terkait, unit G2RT

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baselane	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
				Pengembangan Kewirausahaan kepada masyarakat di Desa Mandiri Budaya dan Rintisan Desa Mandiri Budaya		17 Kalurahan	20 Kalurahan	23 Kalurahan	26 Kalurahan	29 Kalurahan	Dinas Pariwisata DIY	Dinas Pariwisata DIY & Kabupaten; Dinas Kebudayaan DIY & Kabupaten, DP3AP2 DIY & Kabupaten, Dinas Koperasi DIY & Kabupaten, Kalurahan
				Forum Kemitraan Usaha	1 kali	1	1	1	1	1	DPMPTSP DIY	Dinas Koperasi dan UMKM DIY, Bank Indonesia, Pelaku Usaha Besar/Sedang DIY, Pelaku UMKM DIY
				Peserta Bimbingan Teknis Online Single Submission (OSS)	50 orang	50	50	50	50	50	DPMPTSP DIY	OPD Teknis Pengampu Pelayanan Perizinan, Pelaku UMKM DIY
2	Fasilitasi dan intermedia si	Fasilitasi teknologi transfer, perlindungan	Peningkatan jumlah inovasi siap hilir	Jumlah inovasi dan produk yang dipatenkan	0	3	5	7	9	11	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	Disperindag, HAKI

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
	penghiliran inovasi daerah	an Kekayaan Intelektual dan ragam skema pendanaan kreatif	mendapat perlindungan Kekayaan Intelektual (paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, DTLST-desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman)	Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner/NKV (unit)	21	22	23	24	25	26	DPKP DIY	Dinas Pertanian/Peternakan Kabupaten/Kota,
										Peternak dan Pelaku Usaha Hasil Peternakan		
				Registrasi Kebun Hortikultura (sertifikat)	400	250	275	300	325	350	DPKP DIY	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota,
										Petani/Kelompok Tani Hortikultura		
				Sertifikasi/Surveilan Sertifikasi Organik Komoditas Hortikultura (sertifikat)	3	1	1	1	1	1	DPKP DIY	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota,
						Lembaga Sertifikasi Organik (LSO),						
Registrasi Pangan Segar	20	20	20	20	20	20	DPKP DIY	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota,				

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseli ne	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
				Asal Tumbuhan (PSAT)/Sertifikasi Prima/Registrasi Rumah Kemas (sertifikat)								Petani/Kelompok Tani/Asosiasi dan pelaku usaha perorangan, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) DIY
				Luas areal yang mengajukan sertifikasi untuk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Hektar)	391	430	440	450	450	450	DPKP DIY	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, produsen dan penangkar benih
				Rekomendasi Produsen dan Pengedar Benih Hortikultura (Rekomendasi)	9	6	7	8	8	8	DPKP DIY	Produsen, penangkar, dan pengedar benih hortikultura

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseli ne	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
				Rekomendasi Produsen dan Pegedar Benih Tanaman Pangan (Rekomendasi)	11	14	16	18	20	20	DPKP DIY	Produsen, penangkar, dan pegedar benih tanaman pangan
				Rekomendasi Produsen dan Pegedar Benih Perkebunan (Rekomendasi)	1	1	1	1	1	1	DPKP DIY	Produsen, penangkar, dan pegedar benih perkebunan
				Produksi bibit ternak bersertifikat Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB (ekor)	48	65	68	72	75	75	DPKP DIY	-
				Produksi semen beku yang bersertifikat LSPPro/SNI (dosis)	30.342	45.000	46.600	48.300	50.000	50.000	DPKP DIY	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro)
				anggota kelompok Desa PRIMA yang memiliki	23 orang	26 orang	29 orang	31 orang	34 orang	37 orang	1. Pemerinta h Kalurahan 2. DP3AP2 DIY dan Kab/Kota	1. Pemerintah Kalurahan 2. DP3AP2 DIY dan Kab/Kota

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
				mendaftarkan HAKI							3. Dinas Koperasi dan UKM DIY	3. Dinas Koperasi dan UKM DIY
				Jumlah fasilitasi kekayaan intelektual	550	560	570	580	590	600	Dispar/Disperindag DIY	Kemenkumham, Disperindag DIY, BPOM, Bappeda, Diskop Kab/Kota
				Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	23 usaha	0 usaha	15 usaha	30 usaha	40 usaha	48 usaha	Dinas Pariwisata DIY	Dinas Pariwisata Kota/Kabupaten; LSUP, Asosiasi UJP terkait
				Jumlah Pelaku Usaha Ekraf yang difasilitasi pengembangan usahanya (mengikuti pameran atau event)	N/A	0 pelaku usaha	150 pelaku usaha	200 pelaku usaha	250 pelaku usaha	300 pelaku usaha	Dinas Pariwisata DIY	Dinas Pariwisata Kota/Kabupaten; Kementerian Hukum dan HAM Kanwil DIY
				Fasilitasi paten (paket)	3	3	3	3	4	4	Disperindag	

III. RENCANA AKSI PEMANTAPAN ADOPTI DAN DIFUSI INOVASI DAERAH

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
1	Pemantapan adopsi dan difusi hasil inovasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> · Afirmasi adopsi dan difusi hasil inovasi daerah · Perluasan model bisnis kewirausahaan daerah 	Peningkatan omzet hasil inovasi usaha mikro, kecil, dan menengah serta mengalami pengembangan skala (<i>scale up</i>) dan lingkup bisnisnya.	Peningkatan persentase omzet penjualan (setiap wirausahawan)	0	10%	15%	20%	25%	30%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	Diskop UKM DIY, Disperindag, KADIN
				Penambahan variasi produk yang dijual dan/atau penambahan outlet (setiap wirausahawan)	0	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY	Diskop UKM DIY, Disperindag, KADIN
				Terjadinya peningkatan omzet pada kelompok-kelompok UMKM	-	6	6	6	6	6	BPO	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Koperasi dan UMKM - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
												- Organisasi Kepemudaan
				Meningkatnya jumlah kelompok Desa PRIMA yang masuk dalam kategori maju (yang salah satunya ditandai dengan meningkatnya modal kelompok)	14 kelompok	16 kelompok	18 kelompok	20 kelompok	22 kelompok	24 kelompok	1. Pemerintah Kalurahan 2. DP3AP2 DIY dan Kab/Kota	1. Pemerintah Kalurahan 2. DP3AP2 DIY dan Kab/Kota
				Jumlah Wirausaha baru	1615	1715	1815	1915	2015	2115	Diskop UKM DIY	Diskop Kab/Kota, Pramuka, HIPMI, IWAPI
				Pameran Produk Kelautan dan Perikanan	5	16	5	5	5	5	DKP DIY	Asosiasi, Poklamsar, Kab/Kota, Forikan, PKK

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
				Unit G2RT	26	28	31	34	37	40	Pemda, Pemkab, Pemkal, BUMDes	Pemkal, PKK, Karang Taruna, Gapoktan, Pokdarwis, KWT, organisasi masyarakat lainnya, umkm
				Konsistensi Kapasitas Produksi	3,12	3,36	3,72	4,08	4,44	4,8	Pemda, Pemkab, Pemkal, BUMDes, Biro Bermas, Diskop	Pemda, Pemkab, Pemkal, BUMDes, Biro Bermas, Diskop, mitra pasar non kompetisi dan kompetisi
				Jaringan dan Distribusi G2R Tetrapreneur	130	140	155	170	185	200	Pemda, Pemkab, Pemkal, BUMDes, Biro Bermas, Diskop	Unit G2R Tetrapreneur, BUMDes, PemKal, mitra pasar non kompetisi dan kompetisi

No	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target/Tahun					Pemangku Kepentingan	Pihak Terlibat
						2023	2024	2025	2026	2027		
				Komitment Merek dan Kebijakan G2R Tetrpreneur (3R-G2RT)	26	28	31	34	37	40	Pemda, Pemkab, Pemkal, BUMDes, Biro Bermas, Diskop	Unit G2R Tetrpreneur, BUMDes, PemKal, mitra pasar non kompetisi dan kompetisi

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X